



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Ternate per 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Ternate. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Ternate, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Dalam laporan BPK Nomor 4.A/LHP/XIX.TER/07/2011 tanggal 5 Juli 2011, BPK tidak menyatakan pendapat atas Neraca Pemerintah Kota Ternate per tanggal 31 Desember 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 karena masalah-masalah (1) Terdapat persediaan pada DPPKAD yang tidak dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik akhir tahun dan tidak dinilai berdasarkan harga perolehan sebesar Rp460.272.655,00; (2) Pencatatan atas dana bergulir belum didukung dengan data pembayaran terakhir dan kebijakan penetapan umur piutang dari pengelola dana bergulir belum ada; (3) Nilai investasi permanen pada PD CG dan PDAM Kota Ternate belum disajikan dengan metode ekuitas dan belum didukung dengan laporan keuangan yang telah diaudit; (4) Terdapat aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya, rusak berat, tidak dapat ditelusuri atas aset yang telah diserahkan kepada PDAM Kota Ternate, 89 bidang tanah dan 41 unit kendaraan belum dinilai dengan harga wajar dan 20 unit kendaraan tidak dikuasai oleh Pemerintah Kota Ternate; (5) Terdapat selisih penyeteroran PFK sebesar Rp87.185.186,00; (6) Terdapat selisih pendapatan asli daerah yang belum dapat dijelaskan sebesar Rp465.083.367,00; (7) Terdapat selisih belanja yang belum

dapat dijelaskan sebesar Rp5.343.698.609,00; (8) Terdapat belanja perjalanan dinas yang belum didukung bukti yang lengkap sebesar Rp1.842.490.000,00 dan (9) Terdapat selisih SiLPA yang belum dapat dijelaskan sebesar Rp239.164.604,00.

Pada tahun 2011, Pemerintah Kota Ternate telah melakukan (1) Inventarisasi fisik pada akhir tahun dan melakukan pencatatan persediaan pada kartu persediaan; (2) Inventarisasi dana bergulir telah disajikan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan; (3) Inventasi permanen telah dicatat berdasarkan nilai ekuitas; (4) Aset tetap telah dilakukan penilaian kembali; (5) Selisih hutang PFK telah diakomodir dalam saldo awal hutang PFK Tahun 2011; (6) Rekonsiliasi atas selisih PAD, belanja dan SiLPA telah dilakukan; (7) Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sudah dalam proses penyelesaian.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.4.1.2 atas Laporan Keuangan dan catatan nomor 9 atas Laporan Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Ternate melaporkan saldo kas di di bendahara pengeluaran pada Neraca per 31 Desember 2011 dan 2010, masing-masing sebesar Rp803.072.742,00 dan Rp355.436.628,00. Pemeriksaan atas pengelolaan kas di bendahara pengeluaran tersebut menunjukkan: (1) Terdapat kekurangan kas pada 3 SKPD sebesar Rp377.279.114,02; (2) Penyalahgunaan kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp387.205.419,00; (3) Penggunaan kas belum dipertanggungjawabkan bendahara pengeluaran pada Badan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sebesar Rp70.109.141,97; (4) Terdapat realisasi belanja tahun 2011 yang digunakan untuk kegiatan tahun 2012 sebesar Rp154.915.845,00; (5) Saldo kas di bendahara pengeluaran tahun 2010 belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp148.005.553,00; (6) Terdapat perbedaan antara saldo kas pada CaLK dengan register penutupan kas SKPD. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai kas di bendahara pengeluaran tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.4.2.2 atas Laporan Keuangan dan catatan nomor 4 atas Laporan Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Ternate melaporkan saldo investasi permanen per 31 Desember 2011 dan 2010, masing-masing sebesar Rp14.216.368.263,10 dan Rp7.632.272.265,43. Pemeriksaan atas pengelolaan Investasi Permanen tersebut menunjukkan: (1) Pemerintah Kota Ternate belum menindaklanjuti saran BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2010 untuk melengkapi dokumen kepemilikan penyertaan modal Pemerintah Kota Ternate dan menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada BPK; (2) Pencatatan nilai penyertaan modal pada PD CG sebesar Rp1.312.396.722,00 tidak didasarkan pada Laporan Keuangan yang telah diaudit; (3) Penyertaan modal pada PDAM Kota Ternate sebesar Rp9.103.971.541,10 tidak didukung oleh bukti-bukti transaksi dan tidak didasarkan laporan keuangan yang telah diaudit. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai investasi permanen tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.4.3 atas Laporan Keuangan dan catatan nomor 2, 7 dan 8 atas Laporan Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Ternate melaporkan saldo aset tetap per

31 Desember 2011 dan 2010, masing-masing sebesar Rp1.544.800.182.967,00 dan Rp941.595.674.146,57. Pemeriksaan atas pengelolaan aset tetap tersebut menunjukkan: (1) Pemerintah Kota Ternate belum menindaklanjuti seluruh saran BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2010 terkait aset tetap; (2) Bidang Akuntansi dan Bidang Aset DPPKAD belum melaksanakan rekonsiliasi atas penyajian saldo aset tetap dalam laporan keuangan; (3) Terdapat selisih mutasi aset tahun 2011 dengan realisasi belanja modal selama tahun 2011 sebesar Rp517.356.971.477,43; (4) Aset tetap tanah sebesar Rp183.081.144.511,00 dan kendaraan sebesar Rp24.877.896.142,50 tidak didukung bukti kepemilikan dan sebanyak 2 bidang tanah dan 12 kendaraan tidak diketahui harga perolehannya. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai aset tetap tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.4.4 atas Laporan Keuangan dan catatan nomor 3 atas Laporan Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Ternate melaporkan saldo aset lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010, masing-masing sebesar Rp24.832.672.963,00 dan Rp0,00. Pemeriksaan atas pengelolaan aset lainnya tersebut menunjukkan pencatatan aset lain-lain sebesar Rp8.318.459.692,00 tidak didukung oleh bukti-bukti. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai aset lain-lain tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.1.1.b atas Laporan Keuangan dan catatan nomor 3 atas Laporan Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Ternate melaporkan realisasi belanja barang dan jasa tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp95.467.534.328,00 dan Rp75.010.001.747,00. Realisasi belanja barang dan jasa tersebut termasuk realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp274.305.000,00 dan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp1.855.340.000,00 tidak ditemukan dalam manifes penerbangan. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2011 sebesar Rp2.129.645.000,00.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.1.1.c atas Laporan Keuangan dan catatan nomor 2 atas Laporan Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Ternate melaporkan realisasi belanja hibah tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp5.051.843.750,00 dan Rp12.770.343.188,00. Realisasi belanja hibah tersebut termasuk: (1) Naskah perjanjian hibah tidak dibuat; (2) Realisasi belanja hibah tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp718.096.784,00; (3) Terdapat sisa dana hibah sebesar Rp112.230.550,00 belum disetorkan ke Kas Daerah. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas realisasi belanja hibah sebesar Rp830.327.334,00.

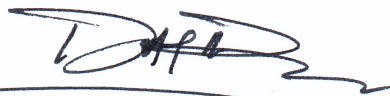
Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 5.1.2.1.3 atas Laporan Keuangan dan catatan nomor 7 atas Laporan Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemerintah Kota Ternate melaporkan realisasi belanja tidak terduga tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp4.799.975.000,00 dan Rp669.664.800,00. Realisasi belanja tak

terduga tersebut termasuk (1) belanja tidak terduga sebesar Rp28.000.000,00 penetapannya tahun 2010; (2) pencairan belanja tidak terduga sebesar Rp299.975.000,00 tidak menggunakan SP2D (3) belanja tidak terduga sebesar Rp551.137.000,00 belum dipertanggungjawabkan. Catatan dan data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas realisasi belanja tak terduga sebesar Rp879.112.000,00.

Menurut pendapat BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika BPK dapat memeriksa kas di bendahara pengeluaran, investasi permanen, aktiva tetap, aktiva lain-lain, belanja barang, belanja hibah dan belanja tidak terduga, Neraca Pemerintah Kota Ternate per tanggal 31 Desember 2011, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Ternate per tanggal 31 Desember 2011, realisasi anggaran, arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 28.B/KLHP/XIX.TER/08/2012 dan Nomor 28.C/KLHP/XIX.TER/08/2012, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Ternate, 2 Agustus 2012
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
Penanggung Jawab Pemeriksaan**


Novian Herodwijanto, SE., MM., Ak.
Akuntan, Register Negara No. D - 11.889 *K*